

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses dan pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Manggarai Timur tahun 2017 dan tahun 2018 belum semuanya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dalam hal pemanfaatan aset Pemerintah Daerah Manggarai juga masih belum optimal, hal ini disebabkan Pemerintah Daerah Manggarai Timur tidak melaksanakan bentuk pemanfaatan terhadap aset yang dimiliki. Inventarisasi dan pengelolaan peralatan seperti komputer, mesin fotocopy, dan peralatan lainnya masih belum maksimal. Ada beberapa fasilitas atau peralatan yang juga merupakan aset dalam pemanfaatannya masih kurang baik, seperti kendaraan dinas yang digunakan untuk keperluan pribadi.

Namun pada tahun 2019 sebagian besar permasalahan tersebut sudah berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, Pengelolaan aset harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan (*good governance*). Melalui pengelolaan aset yang akuntabel dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan menjadi sebuah langkah menjaga momentum pembangunan ekonomi Indonesia serta demi mendorong tercapainya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum di bidang pengelolaan aset.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Manggarai Timur/Badan Keuangan Daerah Manggarai Timur supaya melakukan pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian akuntansi. Dengan keahlian akuntansi yang baik, pengelolaan aset akan lebih maksimal dan aset/barang milik daerah bisa dimanfaatkan dengan lebih efektif sehingga dapat menunjang kinerja pada Badan tersebut.
- b. Pemerintah Daerah Manggarai Timur dalam pengelolaan aset supaya meningkatkan pengelolaan terhadap aset sesuai dengan bentuk-bentuk pemanfaatan. Perawatan terhadap peralatan harus ditingkatkan seperti penegasan terhadap pemakaian peralatan dan melakukan pengecekan barang secara berkala. Pemerintah Daerah Manggarai Timur perlu melakukan pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, H. Sakti. 2020. *Membumikan Pelajaran Akuntansi Sebagai Rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermedite Accounting*. Yogyakarta: BPFE
- Djabbar Yusuf. 2015. *Perubahan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Elder, Beasley dan Arens. 2016. *Auditing And Assurance Service*. Edisi 16: Pearson Education
- Elvy M, Manurung. 2011. *Akuntansi Dasar (untuk pemula)*. Jakarta: Erlangga
- Haryono Jusup. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Hery. 2014. *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Manggarai Timur Tahun 2017 Sampai Tahun 2019
- Martani Dwi. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi. 2001. *Balanced Scorecard Alat Manajemen Kontemporer Untuk Pelipat Ganda Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 Tentang Transaksi-Transaksi Aset
- Permendagri No. 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 Tentang Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 tahun 2011 *Tentang Aset Tetap*

Profil Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi Konsep Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*: Erlangga

Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 2010 *tentang Aset*

Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 *Tentang Aset*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Otonomi Daerah*